



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2001

**REFORMASI PERBURUHAN MELALUI UU NO. 21 TAHUN 2000  
TENTANG PERBURUHAN/PEKERJA DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP PETA AFILIASI ORGANISASI  
PEKERJA DI SURABAYA**

**Peneliti:**

**Drs. KRIS NUGROHO, M.A.**

**Dra. DWI WINDYASTUTI, M.A.**

3000 260023141

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2001

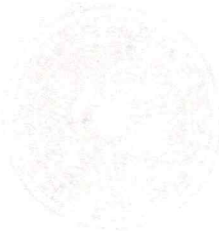
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 5306/J03/PG/2001

Tanggal 12 Juni 2001

Nomor Urut: 30

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Desember, 2001



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
JALAN KH. YUSUF KALYAN, SURABAYA 60132

REFORMASI PERBURUHAN MELALUI UU NO. 27 TAHUN 2000  
TENTANG PERBURUHAN TENAGA DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP PETA AHLI ISI ORGANISASI  
PERUSAHAAN SURABAYA

**MILIK**  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

# LEMBAGA PENELITIAN

1. Puslit Pembangunan Regional.
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
7. Puslit Olahraga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit/Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995346  
E-mail: lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

## IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

3000260023141

1. Judul Penelitian	: Reformasi Perburuhan Melalui UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Perburuhan/Pekerja dan Dampaknya Terhadap Peta Afiliasi Organisasi Pekerja Di Surabaya
a. Macam Penelitian	: <input type="checkbox"/> Fundamental <input checked="" type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan
b. Kategori Penelitian	: <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
2. Kepala Poyek Penelitian	
a. Nama lengkap dan Gelar	: Drs. Kris Nugroho. MA.
b. Jenis kelamin	: Laki-Laki
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Penata/Gol.IIIc/131 801 408
d. Jabatan Sekarang	: Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
f. Univ/Ins./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	: Politik
3. Jumlah Tim, Peneliti	: 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian	: Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi lain	
a. Nama Instansi	: -
b. A l a m a t	: -
6. Jangka waktu penelitian	: 5 (lima) bulan
7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 3.000.000.00
8. Seminar Hasil Penelitian	
a. Dilaksanakan Tanggal	6 Desember 2001
b. Hasil Penelitian	( ) Baik Sekali (V) Baik ( ) Sedang ( ) Kurang

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Surabaya, 6 Desember 2001



Mengetahui/Mengesahkan  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian.

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
NIP 130 701 125

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Tinjauan Pustaka	10
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
Bab IV Metode Penelitian	17
Bab V Hasil dan Pembahasan	19
A. Sejarah Pergerakan Buruh di Jaman Kolonial	19
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berdirinya Serikat Kerja/Buruh di Surabaya	24
C. Afiliasi dan Warna Politik FNPBI	29
D. Afiliasi dan Warna Politik SPSI	32
E. Afiliasi dan Warna Politik SBR	35
F. Afiliasi dan Warna Politik Sarbumusi	39
Bab VI Kesimpulan dan Saran	42
Daftar Pustaka	

## RINGKASAN

**REFORMASI PERBURUHAN MELALUI UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG PERBURUHAN/PEKERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PETA AFILIASI POLITIK PEKERJA DI SURABAYA (Kris Nugroho, Dwi Windyastuti, 2002, 45 halaman)**

Perubahan peta politik nasional sebagai hasil reformasi politik selain ditandai dengan berdirinya juga diramaikan dirikannya serikat-serikat kerja/buruh baik di tingkat nasional mau pun lokal. Banyaknya serikat kerja/buruh yang dideklarasikan di era reformasi ini juga direspon secara positif oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Buruh dimana dalam salah satu pasalnya dijamin adanya kebebasan untuk mendirikan serikatkerja/buruh.

Dengan demikian fokus penelitian menjawab permasalahan aktual menyangkut serikat kerja/buruh di Surabaya yaitu (1) Faktor-faktor sosial dan politik yang mendorong berdirinya serikat-serikat kerja/buruh ; (2) Arah afilisasi dan warna ideologi politik serikat-serika kerja/buruh ; (3) Mendeskripsikan bagaimana serikat-serikat kerja/buruh menjalin kerja sama guna memperkuat dan mendesakkan kepentingan mereka.

Jawaban atas permasalahan pertama adalah menjamurnya serikat kerja/buruh di Surabaya merupakan konsekuensi politik atas iklim kebebasan berserikat melalui UU No. 21 Th. 2000 tentang serikat kerja/buruh. Oleh para pekerja dan aktivis pekerja adanya serikat kerja/buruh dianggap sebagai saluran aspirasi pekerja/buruh untuk memperkuat posisi tawar-menawar pekerja/buruh dengan pengusaha dalam rangka mempengaruhi adanya kenaikan upah kerja, kondisi kerja dan memperjuangkan isu-isu hak-hak insentif lainnya. Kalau hak-hak pekerja/buruh yang di masal lalu diabaikan, di era reformasi perburuhan saat ini mendapat perhatian penuh untuk diwujudkan. Para pekerja/buruh makin kritis berkat adanya serikat-serikat kerja/buruh di masing-masing unit industri yang ada. Adanya kebebasan dan jaminan dalam menyalurkan hak-hak sosial dan politik tersebut membuat pekerja dan aktivis pekerja semakin transparan menyoroti persoalan-persoalan esensial yang menjadi hak-hak mereka, baik yang dilakukan lewat aksi



demonstrasi atau mogok kerja agar tuntutan mereka dipenuhi oleh pengusaha. Delapan pimpinan/pengurus serikat kerja/buruh mewakili Serikat Buruh Rakyat, Fron Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Sarbumusi yang dijadikan responden melalui metode purposive menyatakan bahwa iklim kebebasan era reformasi politik menjanjikan mereka untuk mendirikan asosiasi serikat kerja.

Sedangkan menyangkut pandangan secara umum tentang misi perjuangan mereka, umumnya serikat kerja/buruh memiliki pandangan relatif sama, yaitu upaya memperjuangkan kesejahteraan ekonomi buruh dan menegakkan hak-hak pekerja/buruh yang dimasa Orba diabaikan. Namun dalam wacana ide-ide politik yang lebih spesifik, terdapat perbedaan-perbedaan cukup signifikan. Dua serikat kerja/buruh memiliki pandangan yang bercorak sosial demokrat, seperti SBR dan FNPBI yang umumnya dirintis dan dipelopori oleh para aktivis LSM dan mahasiswa. Ide-ide besar mereka berkisar pada proses untuk mewujudkan ide-ide demokrasi sosial. Perjuangan untuk mendapatkan hak-hak buruh dikaitkan dengan wacana sistem politik yang demokratis. Ide ini mengimplikasikan bahwa upah pekerja/buruh adalah sebagian kecil dari suatu proses kebijaksanaan publik pemerintah. Kalau pemerintah menjunjung nilai-nilai demokrasi sosial, maka akan muncul kebijaksanaan perburuhan yang memperhatikan kepentingan-kepentingan pekerja/buruh sebagai bagian untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja/buruh. Kedua serikat kerja ini secara tajam menyoroti kapitalisme dan konsentrasi kekayaan yang dianggap merugikan rakyat kecil (pekerja/buruh).

Sedangkan SPSI dan Sarbumusi lebih pragmatis. SPSI merupakan warisan serikat kerja yang menjadi salah satu instrumen pendukung pemerintah Orba. SPSI hadir sebagai representasi dan kaki tangan penguasa Orba dalam rangka untuk menjinakkan suara buruh agar tidak kritis dan menentang kebijakan-kebijakan perburuhan Orba yang represif dan merugikan hak-hak sosial, ekonomi dan politik buruh. SPSI mewakili campur tangan pemerintah Orba yang korporatis, yaitu menjadikan SPSI sebagai satu-satunya saluran wahda buruh. Karena itu hadirnya SPSI saat ini bisa dipahami posisinya jauh lebih lunak dan tidak terlalu agresif atau radikal dalam memperjuangkan nasib

pekerja/buruh dibanding SBR dan FNPBI. Kalau SPSI warisan Orba, maka Sarbumusi merupakan serikat kerja/buruh yang berafiliasi ke NU. Asas berubah dari Islam (1952) ke Pancasila (era Orba). Selama Orba Sarbumusi memilih non aktif walau pun mereka tidak menyatakan bubar. Hal ini sebagai konsekuensi dominasi SPSI sebagai satu-satunya serikat kerja/buruh yang dianggap sah oleh Orba. Saat ini, ide-ide perjuangan Sarbumusi adalah memperjuangkan kesejahteraan pekerja/buruh lewat cara-cara musyawarah mufakat, yaitu perundingan (negosiasi) dengan pengusaha/pemerintah. Model pemogokan atau demonstrasi pekerja/buruh dianggap kurang tepat karena hanya akan merugikan pekerja/buruh sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan adanya penelitian yang sifatnya membandingkan ide-ide perjuangan serikat kerja/buruh yang ada di Surabaya dengan di kota-kota industri lainnya guna menyusun *base line data* menyangkut peta ide-ide politik perjuangan pekerja/buruh. Dengan demikian akan diketahui lebih jauh tentang ciri-ciri dan karakteristik khas serta latar belakang sistem nilai politik serikat-serikat kerja/buruh yang menjadi landasan perjuangan mereka dalam membela kaum pekerja/buruh.

(Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga :  
No. Kontrak 589/JO3.2/PG/2001 DIK Supl 2001)

## Kata Pengantar

Penelitian merupakan aspek pengembangan kapasitas intelektual seseorang yang senantiasa perlu diasah untuk mempertajam analisis dan pengamatannya. Dunia pendidikan tinggi khususnya perguruan tinggi, merupakan salah satu wadah ideal untuk mewujudkan kapasitas tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis berkat kerja sama dan dukungan dana oleh lembaga Penelitian Universitas Airlangga diharapkan mampu memenuhi harapan tersebut.

Maka tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak seperti teman-teman mahasiswa yang membantu menggali data lapangan, tim penilai dari Lembaga Penelitian Universitas Airlangga serta semua rekan yang telah membantu secara intelektual dalam memberi *in put* dan dorongan hingga selesainya laporan penelitian ini.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, artinya tiada karya yang sempurna sehingga saran atau masukan tetap diperlukan sebagai bagian dari penyempurnaan karya laporan penelitian tersebut.

Surabaya, 10 April 2002

Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

### A. Latar Belakang Masalah

Dampak politik reformasi selain membuahkan tumbuhnya partai-partai politik dan pemilu multi partai tahun 1999, juga membuahkan lahirnya organisasi-organisasi pekerja yang semakin beragam dan radikal. Lahirnya organisasi pekerja ini menandai bangkitnya semangat untuk memperjuangkan aspirasi pekerja yang selama orde baru sangat dibatasi dan dikendalikan oleh negara. Sejak era reformasi politik, tercatat sekitar 20 organisasi pekerja yang terdaftar di departemen tenaga kerja, baik yang berafiliasi ke partai politik tertentu atau yang tidak, yaitu SARBUMUSI, KMB, GASBINDO, FSBDI, PPMI, FAKUBA, FPSI Reformasi, SBSI, FSPMI, GASPERMINDO, SP Independen, ASPEK Indonesia, ASOKADITA, KPNI, KBKI, GSBI, KORPRI, SBMSK, dan FSP BUMN (uwiyono, 2001).

Sementara itu, di Surabaya terdapat beragam organisasi pekerja yang mengklaim mewadahi aspirasi pekerja, diantaranya SBK (Serikat Buruh Kerakyatan), SBR (Serikat Buruh Regional), SPTSK, LSKBH, Kerukunan Pekerja Katolik. Dalam kenyataannya sulit mendeteksi secara pasti jumlah keseluruhan organisasi pekerja yang ada di suatu daerah. Ada yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja tapi juga lebih banyak yang tak terdaftar. Mereka baru muncul sebagai suatu wadah pekerja pada saat terjadi aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah kerja.

Menjamurnya organisasi pekerja di berbagai daerah industri adalah berkat dari reformasi perburuhan, yaitu dimungkinkannya pekerja untuk membentuk serikat pekerja (SP) di tempat mereka kerja. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh menyatakan : (ayat 1) setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Selanjutnya (ayat 2) serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

Pasal 5 Undang-Undang di atas adalah cermin kebebasan bagi para pekerja untuk berasosiasi sekaligus rontoknya dominasi negara dalam mengkooptasi organisasi pekerja. Adanya kebebasan dalam membentuk serikat pekerja (SP) tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh para pekerja untuk memperkuat posisi mereka dalam melakukan menekan pengusaha dan pemerintah guna adanya perbaikan upah kerja.

Ditilik dari lintas perjuangan mereka, ada organisasi pekerja yang bersifat lokal maupun nasional. Bahkan beberapa diantaranya, memiliki jaringan kepentingan ke partai politik, baik secara langsung mau pun tak langsung. Dari organisasi pekerja yang terdaftar, ada 3 yang berfungsi sebagai saluran kepentingan pekerja yang memiliki afiliasi ke partai politik, misalnya FNBI (Afiliasi ke PRD), FSPSI (partai Golkar), SARBUMUSI (PKB) dan Baladhika Karya (militer Golkar).

Menjamurnya organisasi pekerja ini sangat kontras dengan era sebelumnya (orba) dimana pemerintah hanya mengakui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai satu-satunya organisasi pekerja yang dianggap sah oleh

pemerintah sebagai saluran aspirasi seluruh pekerja di Indonesia. Artinya, diluar SPSI ini, tidak boleh berdiri organisasi pekerja lain.

Organisasi-organisasi pekerja, baik yang dibentuk pekerja dilingkungan unit kerja mereka sendiri, maupun yang dibentuk oleh para aktivis LSM yang menaruh kepedulian terhadap nasib pekerja, menandakan bahwa saat ini mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya memperjuangkan hak-hak ekonomi, hukum dan politis pekerja lewat saluran organisasi. Kalau pada masa orba, pekerja takut membentuk asosiasi pekerja diluar SPSI, maka saat ini pekerja dengan leluasa bisa mendirikan asosiasi pekerja sesuai dengan kepentingan mereka. Maka tidak mengherankan kalau suatu unit usaha (pabrik) memiliki lebih dari satu organisasi pekerja dengan corak atau warna kepentingan (politik dan ideologis) yang beragam pula.

Sebagai kota yang dipadati kawasan industri, posisi Surabaya merupakan daerah yang memiliki kekayaan infrastruktur ekonomi potensinya dapat menjadi barometer kemajuan ekonomi Jawa Timur. Tercatat pada tahun 2000, Surabaya memiliki 146 unit industri besar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 75.860 orang, 508 Industri sedang dengan jumlah tenaga kerja 21.652 orang dan 10.401 unit industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 206.470 orang (Surabaya Dalam Angka Tahun 2000).

Dengan latar belakang infrastruktur ekonomi yang cukup besar seperti itu, dinamika sosial dan politik Surabaya, diantaranya akan dipengaruhi sekali oleh dinamika sektor pekerja. Tuntutan-tuntutan kenaikan upah yang disampaikan pekerja semakin meningkat baik dalam bentuk mogok kerja, demonstrasi pekerja sampai aksi-kasi kekerasan yang acapkali mewarnai tuntutan kenaikan upah.

Dinamika pekerja di Surabaya ini dapat diukur dari makin banyaknya organisasi-organisasi pekerja yang dideklarasikan 3 tahun terakhir ini. Bermunculannya organisasi pekerja ini menandakan bahwa : 1) mulai muncul kesadaran para pekerja untuk memperjuangkan kondisi upah yang murah ; 2) adanya konsolidasi pekerja untuk memperkuat posisi tawar dalam menghadapi pengusaha dan pemerintah di saat perundingan menyangkut upah kerja (<http://www.unisosdem.org/l-umpjakarta.htm>).

Dengan demikian, aktivitasnya organisasi pekerja ini bergerak dibidang penyadaran terhadap pekerja agar sadar akan hak-haknya: memberi bantuan/advokasi atau pembelaan terhadap para pekerja jika sedang menghadapi perselisihan dengan pengusaha, dan mengorganisasi suatu unjuk rasa atau demonstrasi berkenaan isu-isu upah kerja. Contohnya, beberapa organisasi pekerja yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Surabaya dan Sidoarjo menggelar demonstrasi menuntut kenaikan UMR. Demonstrasi yang melibatkan ribuan pekerja tersebut berhasil menekan pemerintah daerah sehingga UMR dinaikkan dari Rp. 236.00,- menjadi Rp. 330.700,- (Surabaya Post, 29-11-2000).

Dinamika organisasi pekerja dalam memperjuangkan perbaikan kondisi upah kerja yang lebih layak dan manusiawi nampaknya akan terus berlanjut seiring makin meningkatnya indek kebutuhan barang-barang kebutuhan pokok. Imbas krisis ekonomi tetap menjadi alasan populer bagi pekerja untuk menuntut kenaikan upah kerja dan kondisi kerja yang lebih baik. Pola penyampaian tuntutan ini disampaikan lewat aksi mogok kerja di lingkungan pabrik sampai tuntutan mereka dipenuhi majikan mereka. Sebaliknya kalau mogok kerja tidak

berhasil menekan majikan guna menaikkan upah, pekerja biasanya melakukan *long march* guna mengadu ke DPRD. Cara kekerasan atau demonstrasi yang menghasilkan bentrok antara pekerja dengan aparat biasanya terjadi dalam aksi demonstrasi dimana pekerja sudah makin frustrasi karena gagal atau tidak berhasil menekan majikan untuk menaikkan upah mereka.

Berbagai kejadian menunjukkan, aksi demonstrasi pekerja justru menimbulkan bentrok dengan aparat kepolisian. Di depan gedung gubernuran Surabaya, bentrok pekerja vs aparat terjadi saat ribuan pekerja Surabaya, Gresik dan Sidoarjo menuntut UMR upah minimum regional. Isu lain yang sempat menjadi sumber ketegangan antara pekerja dengan pemerintah adalah soal diberlakukannya Kepmennakertrans (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) No. 78 Tahun 2001 dan No. 111 Tahun 2001 yang dianggap akan menghilangkan hak-hak berserikat mereka.

Tekanan yang keras lewat aksi-aksi demonstrasi nampaknya membuat pemerintah pusat mau pun daerah melunak dalam menghadapi tuntutan pekerja. Hal ini nampak dari makin terbukanya sikap pemerintah dalam merevisi upah kerja regional. Di Jawa Timur, secara bertahap upah regional 2001 dikoreksi sesuai perkembangan keadaan walau pun koreksi upah kerja tersebut masih jauh dari yang diharapkan pekerja.

Tabel UMR 2001 di Jawa Timur :

No. Kabupaten/Kota	Lama/Rp/ Bulan	Baru/Rp/Bulan
1. Kota Surabaya	236.000	330.700
2. Kab. Gresik	236.000	330.000
3. Kab. Sidoarjo	236.000	330.000
4. Kab. Mojokerto	236.000	317.200
5. Kota Mojokerto	236.000	317.200
6. Kab. Malang	236.000	300.000

7. Kota Malang	236.000	300.000
8. Kab. Pasuruan	236.000	316.000
9. Kota Pasuruan	236.000	306.800
10. Kab. Probolinggo	236.000	285.000
11. Kota Probolinggo	236.000	290.000
12. Kab. Madiun	212.000	235.000
13. Kota Madiun	212.000	235.000
14. Kab. Kediri	212.000	275.000
15. Kota Kediri	212.000	275.000
16. Kab. Banyuwangi	212.000	232.564
17. Kab. Ngawi	212.000	233.000
18. Kab. Magetan	212.000	233.000
19. Kab. Tuban	212.000	243.800
20. Kab. Jember	212.000	275.000
21. Kab. Sumenep	212.000	220.000
22. Kab. Jombang	208.000	241.280
23. Kab. Situbondo	208.000	241.449
24. Kab. Lamongan	208.000	238.032
25. Kab. Lumajang	208.000	220.500
26. Kab. Ponorogo	208.000	228.800
27. Kab. Tulungagung	208.000	246.000
28. Kab. Bangkalan	208.000	247.775
29. Kab. Nganjuk	208.000	239.200
30. Kab. Bondowoso	208.000	250.000
31. Kab. Bojonegoro	208.000	234.565
32. Kab. Trenggalek	202.000	222.000
33. Kab. Pacitan	202.000	222.000
34. Kab. Pamekasan	202.000	250.000
35. Kab. Sampang	202.000	246.400
36. Kab. Blitar	202.000	233.000
37. Kota Blitar	202.000	233.000

Walaupun upah pekerja telah dikoreksi pemerintah, tidak berarti gejolak pekerja menjadi surut. Perlawanan pekerja untuk memperjuangkan perbaikan upah kerja terus berjalan. Hal ini terlihat dari maraknya aksi-aksi penuntutan kenaikan upah kerja. Salah satu alasan pekerja menuntut kenaikan upah adalah alasan ekonomi, yaitu makin tingginya biaya hidup di Surabaya dan daerah-daerah yang menjadi pusat industri. Naiknya harga barang kebutuhan pokok (sembako) sebagai imbas krisis ekonomi menjadikan para pekerja makin

marginal karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan minimum mereka secara layak. Karena itu, para pekerja menganggap tuntutan kenaikan upah merupakan tuntutan yang sudah sewajarnya.

Di lain pihak, tuntutan kenaikan upah kerja ini membawa dilema bagi pekerja. Banyak sektor usaha (pabrik) dan majikan yang menganggap tuntutan kenaikan upah itu belum waktunya. Para pemilik usaha (pabrik) menganggap, imbas krisis ekonomi tidak hanya menyusahkan para pekerja, tapi juga membawa dampak yang besar bagi kelangsungan hidup usaha mereka. Contohnya, melemahnya rupiah terhadap dollar membuat bahan baku mengalami kenaikan yang tinggi disamping juga produk mereka makin kurang kompetitif akibat lesunya perekonomian domestik. Bagi produk-produk yang dipasarkan di pasar domestik, lemahnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi pendapatan para pengusaha. Atas dasar inilah, kebanyakan para pengusaha telah mencanangkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal guna mengurangi kerugian-kerugian yang makin besar (Surabaya Post, 21-12-2001).

"Ancaman" PHK massal ini makin kencang tatkala pemerintah daerah di Jawa Timur merevisi UMR 2001 yang dianggap sudah tak lagi sesuai dengan kondisi riil dimana nasib pekerja makin terpuruk secara ekonomi, tingginya inflasi tiap-tiap daerah dan makin membungunya harga-harga kebutuhan pokok. Atas dasar situasi ini, pemerintah daerah Jawa Timur menetapkan kenaikan upah pekerja per 1 Januari 2002 sebagai revisi atas UMR 2001.



Tabel Upah Minimum Kabupaten/Kota 2002

Kab/Kota	2002/Rp	Kab/Kota	2002/ Rp
1. Kota Surabaya	453.200	22. Kab Pacitan	250.000
2. Kab. Sidoarjo	453.000	23. Kab. Kediri	361.250
3. Kab. Pasuruan	453.000	24. Kota Kediri	361.250
4. Kab. Mojokerto	453.000	25. Kab. Nganjuk	280.000
5. Kota Mojokerto	453.000	26. Kab.	
6. Kab. Malang	443.000	Tulungagung	290.000
7. Kota Malang	443.000	27. Kab.	
8. Kota Pasuruan	375.000	Trenggalek	245.000
9. Kab. Jombang	304.512	28. Kab. Blitar	267.950
10. Kab. Probolinggo	390.000	29. Kota Blitar	273.775
11. Kota. Probolinggo	400.000	30. Kab.	
12. Kab. Banyuwangi	267.500	Bojonegoro	253.750
13. Kab. Jember	315.500	31. Kab. Tuban	280.370
14. Kab. Situbondo	255.481	32. Kab. Lamongan	273.737
15. Kab. Lumajang	260.000	33. Kab. Bangkalan	330.000
16. Kab. Bondowoso	250.000	34. Kab. Sampang	275.000
17. Kab. Madiun	253.800	35. Kab.	
18. Kota Madiun	260.000	Pamekasan	300.000
19. Kab. Ngawi	256.300	36. Kab. Sumenep	295.000
20. Kab. Magetan	260.000	37. Kota Batu	443.000
21. Kab. Ponorogo	252.000		

Dari gambaran naik-turunnya upah pekerja dan kecenderungan maraknya aksi demonstrasi pekerja menuntut kenaikan upah kerja, maka sangat relevan sekali kalau diadakan penelitian lapangan guna mengidentifikasi peta empiris organisasi pekerja, warna ideologi pergerakan mereka dan arah afiliasi politik mereka khususnya di Surabaya selama periode 1998-2000.

Dengan demikian, fokus penelitian ini akan membahas: faktor-faktor sosial politik yang melatar belakangi berdirinya organisasi-organisasi pekerja, bagaimana warna kepentingan ideologi-politik dan arah afiliasi politik mereka, dan bagaimana organisasi-organisasi pekerja ini menjalin hubungan dengan organisasi pekerja

yang lain sebagai suatu gerakan pekerja dalam rangka menggulirkan isu-isu yang akan mereka tampilkan guna menarik dukungan publik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Serikat kerja (SP) yang didirikan pekerja di era reformasi saat ini merupakan bentuk “perlawanan” politik mereka atas dominasi pemerintah dalam mengkooptasi kekuatan pekerja yang berlangsung intensif pada era Orba. Era tersebut dianggap merupakan era pengendalian negara atas sektor-sektor sosial politik (parpol, ormas, mahasiswa, pekerja, intelektual, media massa) guna menunjang tingkat stabilitas politik yang tinggi sebagai prasyarat politis keberhasilan pembangunan ekonomi dan industrialisasi.

Asumsi yang melandasi pengendalian negara atas sektor masyarakat tersebut adalah keberhasilan pembangunan ekonomi dan industrialisasi ditentukan oleh adanya stabilitas di bidang politik nasional. Kegagalan era 1950-an dan 1960-an dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dan industrialisasi di antaranya disebabkan oleh intensitas konflik partai-partai politik yang begitu parah dan adanya gerakan kedaerahan sehingga kabinet mudah goyah dan runtuh. Konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan terpecah antara persaingan politik elite (konflik vertikal) dengan upaya untuk pemusatan kekuasaan, yang justru hanya menghasilkan ketiadaan stabilitas politik nasional.

Tesis negara Orde Baru (OB) dibangun atas dasar bahwa kegagalan menciptakan stabilitas politik di era 50-an dan 60-an menjadi titik terlemah pemerintahan multi partai di mana kekuasaan politik terfragmentasi (tersebar) dalam kutub-kutub politik yang cenderung menjauh dari pusat kekuasaan (negara).

Karena itu OB lahir untuk menata kembali tertib politik yang hancur akibat fragmentasi politik masa lalu. Kerangka politik yang melandasi berdirinya OB terkonsentrasi pada tiga sasaran utama.

Pertama, merancang lembaga kepresidenan yang kuat didukung militer sebagai penstabilisator politik nasional. Kedua, dikembangkannya sistem perwakilan kepentingan politik yang hirarkis dimana kepentingan-kepentingan politik masyarakat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan-kepentingan negara dan atau pemerintah. Sistem perwakilan politik hirarkis ini menghasilkan kooptasi negara yang sangat kuat atas setiap aktivitas sosial politik masyarakat. Ketiga, diciptakannya sistem ideologi dominan Pancasila sebagai sebagai satu-satunya ideologi yang melandasi setiap AD/ART parpol dan ormas

Sektor-sektor sosial dan politik yang dikendalikan negara secara nyata (selain media massa) adalah partai politik dan organisasi kemasyarakatan lewat Undang-Undang No. 3 Th. 1985 tentang partai politik dan Golkar dan Undang-Undang No. 8 Th. 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Dua undang-undang di bidang politik ini menjadi dasar legitimasi politik utama OB untuk menata dan mengendalikan situasi kepolitikan nasional, termasuk legitimasi negara dan pemerintah untuk menyatakan sah dan tidak sahnya suatu partai politik atau ormas.

Lewat undang-undang bidang politik di atas, pemerintah secara sah dapat mengintervensi urusan-urusan internal partai politik dan ormas, seperti soal pimpinan partai atau ormas. Bahkan pemerintah dapat membekukan/membubarkan partai politik/ormas kalau dirasa bertentangan atau bertolak belakang dengan kebijakan/kepentingan pemerintah.

Politik pengendalian OB atas masyarakat ini tujuan akhirnya adalah untuk memudahkan negara mengontrol konflik politik dalam masyarakat, menghilangkan polarisasi kekuasaan politik yang kontradiktif dengan kepentingan negara dan untuk menghasilkan kooptasi menyeluruh (total) negara atas semua kepentingan sosial politik yang berkembang dalam masyarakat. Efek politik dari kooptasi negara atas masyarakat ini adalah terbatasnya atau berkurangnya keleluasaan masyarakat untuk membentuk asosiasi-asosiasi sosial politik guna mengartikulasikan kepentingan mereka.

Salah satu asosiasi masyarakat yang mengalami pembatasan ruang geraknya adalah organisasi serikat pekerja (SP). OB memandang SP memiliki potensi konflik politik yang bisa mengoyahkan stabilitas politik lokal dan nasional lewat aksi-aksi mogok kerja dan boikot atas industri tertentu. Pemerintah nampaknya tidak ingin mengulangi pengalaman era kolonial dan era 50-an dimana SP larut dalam kegiatan ideologis baik yang berhaluan radikal (marxis) mau pun yang non marxis (Hadiz 1996 : 72-74).

Karena itu, OB menata agar SP tidak terfragmentasi ke dalam haluan ideologi politik yang bertentangan dengan kepentingan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) tahun 1973 yang merupakan peleburan dari SP-SP saat itu (Hadiz 1996 : 153). Pada tahun 1975 diluncurkan pola Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Pada 1985 FBSI diubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang diatur dalam pola kemitraan dengan kepentingan negara.



Kuatnya pengendalian negara atas SP ini merupakan ciri korporatisme OB atas SP yang menghasilkan corak hubungan politik yang ; 1). monolitik ; 2). non kompetitif ; 3). dominasi negara.

Adanya perlawanan dari kalangan pekerja untuk mereaksi pengendalian atas SP pelan-pelan mulai bangkit seiring dengan munculnya LSM-LSM yang bergiat di bidang penyadaran pekerja. Karena itu, ada perubahan, SP-SP yang non negara (ingin lepas dari dominasi politik negara) mulai mengintensifkan diri dalam bentuk gerakan-gerakan pekerja merupakan bentuk agregasi kepentingan pekerja yang diorganisasi secara formal dengan landasan, tujuan dan misi politik untuk mempengaruhi kebijakan perburuhan di Indonesia.

Gerakan pekerja ini bisa menjadi gerakan sosial jika kondisi-kondisi politik seperti perasaan tertekan, frustrasi dan tereksplorasi oleh kekuatan luar (kekuatan industri dan pemerintah) mempengaruhi kesadaran kolektif para pekerja. Ketiga kesadaran kolektif ini menjadi acuan awal bagi terbentuknya kepentingan-kepentingan yang lebih ideologis yang nantinya akan mempengaruhi corak aktivitas politik mereka.

Dalam hal ini ada beberapa tahapan yang menyebabkan suatu "tekanan" yang datang dari para pekerja bisa menjadi gerakan soial (C.A. Dawson and W.E. getty).

1. Unrest : Suatu gerakan sosial muncul setelah berkembang kesadaran kolektif diantara anggota kelompok menyangkut keadaan struktur sosial yang dirasa timpang, eksploitatif dan menekan.
2. Excitement : Adanya struktur yang dirasa timpang mengarah pada terbentuknya sikap-sikap agresif guna mereaksi tatanan yang timpang.

3. Formalization : Adanya perubahan dari kesadaran ide-ide kolektif yang laten berkembang menjadi formalisasi gerakan sosial lewat aktivitas organisasi dengan tujuan, misi dan vested interest yang lebih jelas.
4. Institutionalization : Muncul rasionalisasi politik dan kepentingan yang lebih ideologis dimana arah gerakan sosial lebih terfokus guna melakukan bargaining dengan kekuatan luar.
5. Dissolution : Pendesakan tujuan dianggap telah berhasil dengan dipenuhinya tuntutan-tuntutan gerakan sosial.

Dengan demikian pilihan teoritis untuk menganalisis pekerja sangat relevan dengan menggunakan teori gerakan sosial. Sebab dalam kenyataannya, organisasi pekerja acapkali bersifat radikal dengan tidak sekedar tuntutan mereka bersifat ekonomi seperti kenaikan upah tapi terkadang juga politis seperti mempengaruhi keputusan (policy) pemerintah (Duverger 1987). Pekerja juga mempengaruhi sistem pengupahan dan meminta agar diberi ruang berserikat secara lebih bebas. Dalam dimensi politis, aktivitas pekerja berpotensi mempengaruhi distribusi sumber-sumber ekonomi.

Seperti dikatakan Ted Gurr, untuk melihat apakah suatu gerakan sosial seperti gerakan pekerja merupakan gerakan sosial yang melembaga atau tidak, dapat diukur dari beberapa kriteria berikut (Gurr, 1986).

1. Adanya kepentingan ideologis yang secara longgarmengikat kesadaran kolektif massa.
2. Adanya faktor-faktor psikologis-sosial seperti sentimen-sentimen terhadap keadaan yang dirasa tidak ada/timpang.



3. Adanya struktur internal gerakan sosial yaitu distribusi kekuasaan atau kewenangan dalam gerakan sosial itu seperti kepemimpinan dan anggota.
4. Adanya strategi gerakan, yaitu fungsi gerakan sosial sebagai reaksi politis atas tatanan yang dirasa timpang dan tidak adil sehingga aktivitas gerakan sosial dilihat sebagai saluran guna mempengaruhi kehidupan politis.

Dalam studi Ilmu Politik, gerakan pekerja dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial dan politik karena sifat gerakannya mereaksi struktur politik yang dirasa oleh para pekerja tidak adil dan terlalu mengeksploitasi tenaga buruh. Dalam konteks ini, gerakan pekerja berfungsi sebagai gerakan sosial yang bertujuan memperjuangkan nilai-nilai kesadaran kelas (Hadiz, 1996). Dalam konteks yang lebih politis, gerakan pekerja bahkan mereaksi secara radikal sistem politik yang dianggap otoriter, represif dan tidak memberikan kebebasan berasosiasi.

Dalam rangka gerakan pekerja di Indonesia, lahirnya gerakan pekerja di era reformasi ini dapat dikatakan sebagai reaksi atas tatanan politik yang teknokratis dimana kebijakan pemerintah tentang perburuhan (pekerja) cenderung mengasingkan mereka dari proses politik nasional riil. Pekerja hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi yang harus tunduk pada kepentingan dan keputusan politik penguasa. Karena itu, pengorganisasian organisasi pekerja merupakan bentuk "perlawanan" terhadap hegemoni politik atas pekerja.

### BAB III

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk ;

1. Mendiskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya organisasi-organisasi pekerja dan warna ideologi politik organisasi pekerja di Surabaya yang marak bertumbuhan sebagai konsekuensi reformasi politik.
2. Mendiskripsikan bagaimana arah afiliasi politik dan warna ideologi politik organisasi pekerja serta isu-isu politik apa yang mereka gulirkan guna menarik simpati publik.
3. Mendeskripsikan bagaimana organisasi-organisasi pekerja menjalin suatu jaringan kerja satu dengan yang lain sebagai upaya memperkuat dan mendesakkan kepentingan mereka.

### B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian yang deskriptif yaitu berupaya menjelaskan suatu fenomena sosial, maka kontribusi penelitian ini akan berupa :

1. Penyediaan informasi menyangkut masalah-masalah perburuhan sehingga akan menambah kajian yang telah ada.
2. Pengembangan konsep ilmu politik yang berkaitan dengan partisipasi dan gerakan politik khususnya organisasi buruh di tingkat lokal.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### A. Bentuk atau Model Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah kajian deskriptif dengan metode kualitatif yaitu berupaya memaparkan secara analitis faktor-faktor sosial, politik, ekonomi yang mendorong munculnya organisasi-organisasi pekerja, arah afiliasi serta kepentingan politiknya mereka.

#### B. Tehnik Koleksi Data

Ada dua model tehnik koleksi data yang akan digunakan :

1. Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara secara mendalam terhadap aktivis/tokoh organisasi pekerja. Hasil wawancara ini merupakan data primer.
2. Sumber informasi sekunder berupa arsip, penerbitan, dokumen dan kepustakaan lain yang relevan dengan sasaran penelitian ini.

#### C. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnis penarikan sampel penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu mewawancarai 8 orang aktivis/tokoh yang mewakili organisasi pekerja (SPSI, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, Sarbumusi, Serikat Buruh Rakyat) yang ada di Surabaya. Dalam penelitian ini, aktivis/tokoh organisasi pekerja tersebut akan dijadikan sebagai responden penelitian.

#### D. Tehnik Analisa Data

Data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai urgensi/relevansi penelitian yaitu data dari aktivis/tokoh/informan kunci, data dari pekerja/anggota organisasi pekerja yang bersangkutan dan data dari hasil kepustakaan. Data yang relevan dijadikan acuan dan dianalisis secara teoritis sesuai tujuan penelitian.

#### E. Cara Penafsiran Dan Penyimpulan Hasil Penelitian

Penafsiran penelitian dan penyimpulan hasil penelitian berdasarkan masukan data awal dari koleksi data yang telah diklasifikasikan sesuai tehnik analisa data. Selanjutnya dilakukan pengembangan analisis teoritis atas data yang ada dan dari hasil analisis tersebut dirumuskan pokok-pokok pemikiran (hight light) sebagai dasar penyusunan kesimpulan.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Buruh Dalam Konteks Historis-Politis

Sejarah pergerakan perburuhan di Indonesia dapat dilacak dari perjalanan pergerakan kebangsaan (nasionalisme) menentang kekuasaan kolonial Belanda pada awal akhir abad 19 dan menjadi makin kuat pada awal abad 20. Konteks kelahiran gerakan buruh yang dilandasi semangat anti-kolonial menempatkan gerakan buruh pada posisi yang sejajar secara politik dengan semangat anti-kolonial yang dikembangkan partai-partai politik.

Bahkan dapat dikemukakan gelombang perlawanan buruh terhadap kekuasaan kolonial Belanda sebetulnya sebetulnya sudah dimulai pada 1870 an semenjak Belanda mengetrapkan kebijakan Tanam Paksa (Cultuurstelsel) tahun 1830 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tanam Paksa ini adalah kebijakan pemerintah Belanda untuk memobilisasi secara besar-besaran massa rakyat petani di Hindia Belanda untuk bekerja dan menanam komoditas ekspor yang sangat diperlukan Belanda sebagai sumber pemasukan kas kerajaan (Djuliati, 2000 : 104).

Era tanam paksa ini merupakan era dimana perusahaan-perusahaan besar Belanda (state and private enterprises) membuka lahan-lahan perkebunan seperti kopi, tea plantation, gula, kayu dan bahkan pertambangan (Djuliati: 2-5). Makna dari kehadiran tanam paksa adalah liberalisasi ekonomi, dimana komoditas dibagi menjadi dua bagian, yaitu komoditas alam (hasil perkebunan) dan komoditas buruh sebagai penopang proses produksi tanam paksa. Perkembangan liberalisasi

ekonomi ini menjadi awal dimana dikenal buruh bergaji (wage-labor) di Indonesia era kolonial.

Organisasi buruh yang tercatat sebagai penopang ekonomi perkebunan saat itu adalah organisasi buruh rel kereta api didirikan tahun 1908 (Hadiz, 1996: 78). Perkembangan berikutnya, adalah organisasi buruh di sektor pertambangan, guru, aparat administrasi pemerintah kolonial dan buruh pegawai pegadaian yang didirikan tahun 1916. Warna agama juga mendominasi gerakan buruh, misalnya Serikat Islam (SI) mendapat dukungan cukup besar di kalangan petani dan buruh perkotaan. Warna yang lebih ideologis, dijumpai pada ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) yang beraliran sosialis yang kemudian menjadi cikal-bakal PKI. ISDV ini mengklaim mewakili unsur proletariat, yaitu kaum buruh yang secara ekonomi dan politik tertindas oleh sistem kapitalisme.

Secara tematik, gerakan buruh di era kolonial memberi impresi pada semangat anti-kolonial, baik yang diwacanakan oleh gerakan buruh yang berafiliasi pada partai politik mau pun yang tidak berafiliasi pada partai. Adanya persamaan kepentingan politik ini membuat gerakan buruh cenderung dinilai pemerintah kolonial Belanda sebagai gerakan bisa membayakan posisinya. Contohnya pada aksi pemogokan besar-besaran serikat buruh pegadaian yang dipimpin Abdul Muis dari CSI (Central Serikat Islam), yaitu serikat kerja dibawah naungan SI. PKI mendukung pemogokan tersebut sehingga Belanda melakukan pemecatan terhadap pegawai yang ikut mogok (Ricklefs, 1993 : 266).

Kenyataan bahwa beberapa partai politik di era kolonial turut "membidani" atau memiliki *underbouw* pada organisasi buruh, menunjukkan adanya keseriusan mereka untuk menjadikan isu buruh sebagai isu populis di tengah

masyarakat yang mayoritas struktur okupasinya bercorak buruh agraris. Kenyataan sosiologis ini nampaknya berhasil dimanfaatkan secara baik oleh PKI, PNI, Sosialis dan Masyumi guna meraih simpati masyarakat pekerja.

Peta afiliasi politik organisasi buruh paska kolonial (1945) relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Di era multi partai (1950-an) organisasi buruh makin intensif melakukan sosialisasi penyadaran hak-hak berserikat (equal right to form labor union). Munculnya banyak organisasi buruh yang memiliki hubungan secara vertikal dengan partai-partai ini makin membuat masyarakat terbelah ke dalam wilayah pasar politik yang rumit antara isu ideologi, agama, kekuasaan dan kepentingan elite. Kenyataan politik ini menyebabkan peta konflik politik tidak murni berjalan sendiri. Isu buruh dan upah kerja misalnya, acapkali tumpang tindih (cross-cutting in shape) dengan isu-isu politik yang diperjuangkan partai. Isu Buruh dengan demikian, menampakkan dua wajah sekaligus, wajah ekonomi (upah) dan wajah politik (perebutan pengaruh).

Berikut ini sejumlah partai politik paska kolonial yang memiliki hubungan afiliatif dengan sejumlah organisasi buruh.

Organisasi :	Afiliasi :	Anggota :
SOBSI	PKI	2.733.000
KBSI	PSI	376.000
SBII/GASBINDO	MASYUMI	600.000
KBKI	PNI	1.002.000
HISSBI	PARTAI BURUH	261.000
SOBRI	MURBA	281.000
SARBUMUSI	NU	12.000
GOBSII	PSII	1.000
GSBI	PNI	145.000



KBIM	MASYUMI	42.000
O.B. PANTJASILA	PARTAI KATOLIK	61.000
SKBI	PARKINDO	Tak tercatat

Seiring makin sengitnya persaingan ideologi partai-partai di tingkat nasional, pergerakan buruh juga makin ideologis dalam mencari simpati massa. Isu buruh yang menjadi isu strategis tahun 1960-an tumpang tindih dengan isu kekuasaan, menjadi salah satu faktor yang turut memicu konflik-konflik kelas dalam masyarakat Indonesia. Apalagi "kelas" identik dengan marxisme (PKI) membuat organisasi buruh yang berafiliasi pada agama (Islam) makin keras menentang kehadiran organisasi buruh yang bercorak marxis. Pengerasan ini terjadi antara SOBSI (afiliasi dengan PKI) VS Non-SOBSI (Non Marxis) menjelang dan sesudah peristiwa Cou'p tahun 1965. Banyak anggota atau simpatisan SOBSI ditangkapi atau diminta membubarkan organisasi mereka. SOBSI sebagai organisasi buruh berhaluan marxis radikal menghadapi tekanan yang berat dan ancaman pembubaran seiring dugaan keterlibatan PKI dalam peristiwa percobaan cou'p tahun 1965 yang menewaskan sejumlah jenderal militer.

Dalam perkembangan organisasi buruh, paska 1965 menjadi titik balik sejarah pergerakan buruh di Indonesia. Organisasi buruh non-SOBSI dan sejumlah federasi buruh lainnya mendesak pemerintah untuk membekukan atau membubarkan PKI dan ormas-ormas buruh yang berada di bawah garis politiknya.

Peluang politik ini segera disambut oleh pemerintah dan militer lewat kampanye besar-besaran untuk membubarkan PKI dan ormas pendukungnya serta menempatkan mereka sebagai organisasi terlarang.

Tingginya semangat anti PKI ini dimanfaatkan pemerintah untuk mensponsori lahirnya KNPI (Komite nasional Pemuda Indonesia) yang mewakili kelompok ormas pemuda, petani (HKTI), nelayan (HNSI). Lahirnya konfederasi ini dipandang sebagai bentuk awal peran pemerintah dan militer untuk menciptakan model organisasi asosiasional yang monolitik, non-kompetitif dan dibawah kendali militer. Pengorganisasi oleh pemerintah (state-sponsorship) terhadap organisasi buruh dibawah satu atap kendali pemerintah ini menjadi cikal-bakal lahirnya FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia) yang diresmikan tahun 1973.

Kebijakan perburuhan era awal Orde Baru (OB) menurut King (King 1979 :185) berkaitan dengan pilihan model pembangunan ekonomi liberal yang dipilih OB, yaitu model pembangunan kapitalistik yang teknokratis. Model ini mengasumsikan, keberhasilan pembangunan ekonomi (pertumbuhan) sangat bergantung pada cara bagaimana OB menata stabilitas politik nasional. Segmen-segmen partai dan organisasi-organisasi massa dan buruh yang dianggap kontra produktif dengan stabilitas politik OB, diawasi secara ketat lewat pengontrolan negara secara politik dan ideologis. Kebijakan pengontrolan politik ini dikenal dengan istilah korporatisme (state-corporatist regime).

Lewat kebijakan pengontrolan ini pemerintah dan militer dapat mengawasi, membubarkan dan mengangkat kandidat-kandidat organisasi-organisasi sosial politik termasuk buruh, media massa, partai dan kelompok kepentingan profesi yang direstui pemerintah. Tujuan pengontrolan korporatis ini adalah menjinakkan

potensi konflik sosial dalam masyarakat, yang di masa 50-an dan 60-an dimotori oleh konflik-konflik partai dan radikalisme buruh.

Imbas dari kebijakan korporatisme bagi gerakan buruh adalah adanya pemaksaan dari pihak pemerintah untuk mempromosikan FSBI (1973) yang kemudian diubah namanya menjadi SPSI (1985) sebagai satu-satunya organisasi buruh / pekerja yang sah bagi seluruh buruh di Indonesia. Artinya tidak ada organisasi buruh yang boleh berdiri selain yang disponsori pemerintah.

## B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berdirinya Serikat Pekerja/ Buruh di Surabaya

Sejarah pergerakan buruh di Indonesia berubah secara mendasar tatkala krisis ekonomi tahun 1997 yang kemudian diikuti dengan munculnya krisis politik menghasilkan perubahan kekuasaan dari OB ke pemerintahan reformasi dalam tahun 1998. Faktor perubahan regime ini merupakan faktor kunci yang menelorkan perubahan-perubahan di bidang politik dan hukum yang lebih luas.

Ada dua isu politik yang mendapat perhatian pemerintahan baru saat itu. Pertama, pemerintahan presiden BJ. Habibie sebagai pengganti Soeharto yang mundur akibat desakan publik dan tidak adanya dukungan elite-elite sipil dan militer, segera menyatakan dukungannya atas lahirnya sistem multi partai. Kedua, janji pemerintah baru mencabut berbagai regulasi politik terutama produk perundang-undangan politik kepartaian dan keormasan, yang dijadikan alat represi dan pemberangusan kebebasan berserikat dan ekspresi.

Sebagai respon atas desakan publik yang menuntut ruang kelembagaan dan partisipasi politik lebih luas dari masa sebelumnya adalah ditetapkanlah UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam UU ini warga negara dijamin secara bebas boleh menyampaikan pendapat di muka umum sesuai prinsip-prinsip demokrasi (pasal 2). Implikasi politik dari pasal tersebut adalah setiap warga negara baik perorangan mau pun kelompok dapat mengekspresikan derajat kebebasannya dengan lewat aksi-aksi demonstrasi.

Langkah berikutnya yang turut mempercepat terjadinya reformasi mendasar di bidang kebebasan politik sipil adalah disahkannya UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. Dengan ditetapkan dan diakuinya UU tersebut, maka peluang sipil (rakyat) untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak asasinya seperti hak hidup, keyakinan, perlindungan hukum dan hak kebebasan pribadi, nurani dan pikiran menjadi terbuka dan mendapat tempat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perubahan mendasar juga terjadi semenjak disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang memberi dasar bagi munculnya sistem multi partai di Indonesia.

Berkaitan dengan aspek reformasi perburuhan, pemerintah mensahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Buruh. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, pemerintah mengakui adanya keberagaman dalam serikat buruh yang merupakan saluran aspirasi buruh. Konsekuensi politik dari muncul banyak serikat buruh adalah klaim SPSI sebagai satu-satunya wadah buruh menjadi tidak berlaku lagi. Kini buruh makin mudah

membentuk serikat kerja mereka sendiri sesuai kepentingannya asal didukung sekurang-kurang 10 buruh / pekerja (pasal 5 ayat 1 dan 2).

Dengan demikian benang merah yang menandai perbedaan antara regime politik (hukum dan perundangan politik) OB dengan pasca OB terletak pada cara bagaimana sejumlah produk perundang-undangan hukum dan politik dijadikan instrumen represi kebebasan politik. Hukum dan undang-undang politik produk OB lebih diandalkan sebagai alat represi atas masyarakat politik yang diasumsikan berpotensi menjadi pusat-pusat konflik sosial politik yang akan membahayakan kesinambungan kebijakan regime. Karena itu, partai, ideologi partai non-negara, ormas dan buruh mendapat represi yang hebat dari OB.

Dengan munculnya regulasi hukum dan politik yang berderajat demokratis, pergerakan buruh di Indonesia makin bebas dan terbuka mengekspreskan kepentingannya. Pola hubungan antara negara / pemerintah atas buruh yang semula dominatif dan korporatis telah putus dan sebagai gantinya mulai muncul gerakan-gerakan penguatan (empowerment) jaringan-jaringan akar rumput (grass-root) buruh yang makin mendapat tempat di kalangan buruh.

Disahkannya 4 undang-undang yang memberi jaminan adanya ruang berdemokrasi lebih luas bagi masyarakat sipil di atas merupakan political setting yang mewarnai dinamika (tumbuh dan berkembangnya) gerakan-gerakan buruh. Hal ini berarti, legitimasi gerakan buruh yang memiliki beragam latarbelakang kelembagaan guna memformulasikan dan mengagregasikan kepentingan-kepentingan ekonomi, politik dan ideologi semakin bebas dibandingkan era OB.

### C. SIKAP ORGANISASI BURUH SURABAYA TERHADAP REFORMASI PERBURUHAN

Sikap/ respon organisasi buruh Surabaya terhadap disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh menyambut dengan sangat antusias. UU tersebut dianggap sebagai pintu masuk menuju penjaminan berasosiasi dan berekspresi kalangan buruh guna memperjuangkan berbagai isu menyangkut kondisi pengupahan dan kerja. Apalagi pada pasal 5 ayat 1 menjamin bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka adanya klausul tersebut membuat serikat buruh memiliki landasan hukum yang sangat kuat untuk bebas berasosiasi.

Dibanding era OB, hak serikat buruh untuk membentuk serikat buruh berada dalam kontrol kekuasaan pemerintah, dalam hal ini peran Depnaker yang merupakan kepanjangan kepentingan korporatisme pemerintah. Sikap pemerintah OB sangat jelas, yaitu tidak mengakui serikat buruh lain kecuali serikat buruh SPSI sebagai wadah tunggal para buruh.

Pimpinan atau aktivis serikat buruh yang ditemui umumnya menyatakan sikap optimis bahwa undang-undang perburuhan yang baru akan mampu membawa dampak bagi perbaikan nasib buruh. Adanya pengakuan terhadap eksistensi asosiasi buruh dan perlindungan hak-hak buruh akan membuat daya tawar buruh dalam perundingan-perundingan yang menyangkut kondisi kerja akan semakin kuat. Demikianlah harapan mereka pada umumnya.

Namun, apa yang menjadi harapan mereka itu belum sepenuhnya terealisasi. Dalam beberapa kasus, posisi tawar buruh masih lemah dan para

pengusaha masih lebih banyak berlandung di balik kepentingan pemerintah dalam berhadapan dengan buruh, khususnya saat pemogokan terjadi. Walau pun hak untuk melakukan pemogokan diakui sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 (butir e), namun posisi buruh untuk menggunakan hak mogok guna memperjuangkan aspirasi mereka masiha cenderung `dianggap marginal oleh pemerintah. Trauma masa lalu bahwa mogok akan direpresi dengan keras misalnya dipecat (PHK) tanpda pesangon, masih menghantui nasib buruh. Bagi pengusaha dan pemerintah, intimidasi yang mengarah pada pemecatan buruh masih merupakan sarana yang efektif untuk membatalkan niat mogok.

Beberapa pimpinan/ aktivis buruh juga mengatakan praktek-praktek intimidasi masih terjadi sehingga sosialisasi untuk memperjuangkan nasib buruh terkadang kurang mendapat respon dari kalangan buruh sendiri karena takut pemecatan. Sistematika intimidasi inilah yang masih mewarnai penanganan buruh saat ini, di samping cara-cara "lama" yang masih berlaku misalnya stigmatisasi bahwa gerakan buruh telah diracuni ideologi "kiri".

Cara-cara OB dalam penanganan perburuhan yang acapkali masih berlaku adalah : sistematika kontrol pemerintah melalui pendekatan korporatis terhadap serikat buruh meliputi lima (5) cara.

1. Mengendalikan serikat buruh secara integral di bawah Departemen Tenaga Kerja melalui keharusan mendaftar di pemerintah dengan syarat-syarat yang ditentukan pemerintah.
2. Pembatasan hak mogok hanya di tingkat perusahaan dan harus mendapat ijin dari pengusaha dan pemerintah.



3. Pengendalian lembaga perselisihan di bawah lembaga arbitase dan mediasi yang dibentuk negara.
4. Peredaman sejak dini perselisihan perburuhan lewat bipartit dan tripartit
5. Monopoli penentuan upah oleh pemerintah.

#### A. Afiliasi dan Warna Politik Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia

FNPBI muncul sebagai *underbouw* Partai Rakyat Demokrasi (PRD) pada saat krisis ekonomi 1998/99 lalu. Embryonya sudah sejak 1996 dengan nama Pusat Perjuangan Buruh Surabaya dengan tujuan awal membentuk kesadaran ideologi kalangan buruh yang direpresi OB.

Asas FNPBI adalah sosial kerakyatan (AD Bab II. pasal 5) dengan paradigma utama memperjuangkan kaum buruh melawan kekuatan anti buruh, anti rakyat dan anti demokrasi. Lapisan yang menjadi sasaran perjuangan FNPBI adalah buruh industri dan petani karena dua klas sosial inilah yang hak-hak sipil (politik, ekonomi, hukum) diperlakukan tidak adil.

Dengan demikian FNPBI merupakan organisasi yang bergerak membela (advokasi) buruh/ petani yang dikenal cukup radikal dalam melemparkan isu-isu buruh. Hal ini dapat dipahami mengingat secara politik dan ideologi, FNPBI misi adalah misi PRD yang berjuang untuk membangun tingkat kesadaran buruh yang terlelap oleh dominasi represi OB. Isu-isu yang dimunculkan FNPBI di antaranya adalah penghapusan sistem perburuhan yang represif, 32 jam kerja / minggu tanpa pemotongan upah kerja, kebebasan berorganisasi, turunkan harga keburuhan pokok, cabut dwi fungsi ABRI/ TNI.

Tuntutan FNPBI tersebut terkesan radikal karena itu pemerintah bersikap lebih represif tatkala menghadapi aksi demonstrasi atau pemogokan yang dipelopori FNPBI. Contohnya, ketika terjadi aksi pemogokan besar-besaran di kawasan industri Margomulyo tahun 1998, pimpinan aktivis buruh FNPBI Dita Indah Sari oleh polisi dituduh sebagai perancang (provokator) utama aksi pemogokan yang berakhir dengan bentrokan fisik antara buruh dengan aparat kepolisian. Indah Sari kemudian ditanggap dan diadili karena posisinya dianggap dapat membahayakan stabilitas politik nasional.

Dasar perjuangan FNPBI yang cenderung radikal dan tanpa kompromi dalam memperjuangkan nasib buruh ini bukan semata-mata karena FNPBI dan PRD berada dalam wilayah yang dianggap "kiri" oleh pemerintah sehingga dianggap identik dengan gerakan "kiri" seperti komunisme. Adalah karena konsekuensi rasionalitas politik mereka yang mendasarkan asumsi bahwa sistem produksi material akan menentukan corak kekuasaan sistem politik, yang menyebabkan mereka bersikap realistik sama seperti apa yang digagas Marx.

Bagi aktivis FNPBI, pilihan terhadap sistem ekonomi kapitalisme lah yang menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia dikuasi oleh antek-antek kapitalisme asing dan domestik. Pengintegrasian ekonomi Indonesia ke dalam sistem kapitalisme internasional ini mendorong pemitosan ideologi pertumbuhan karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi nantinya akan menghasilkan kemakmuran. Masalahnya siapa yang bisa menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan dengan cepat membawa kemakmuran rakyat? Kenyataan menunjukkan, demikian seorang informan FNPBI menyatakan, pertumbuhan itu

hanya terkonsentrasi dan dinikmati oleh selapisan kecil elite kekuatan ekonomi besar (konglomerat) sementara sebagian besar rakyat dan buruh hidup melarat.

Kapitalisme yang memitoskan pertumbuhan sebenarnya telah gagal menjawab persoalan-persoalan dasar rakyat, terutama pemerataan dan keadilan. Pembangunan ekonomi ala kapitalisme memang menghasilkan besaran ekonomi yang tinggi, namun pertumbuhan ini mengorbankan nilai-nilai sosial seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia dan adanya sistem pengupahan yang represif dimana buruh cenderung dianggap sebagai bagian dari komoditas produksi (mesin) yang harus menguntungkan pengusaha.

Untuk mengubah dan memperjuangkan kondisi pekerja yang buruk, mutlak diperlukan perubahan sistem politik menuju yang demokratis dan berpihak pada (lapisan) rakyat kecil. Undang-undang perburuhan yang selama OB dijadikan instrumen represi aspirasi buruh harus dihapuskan diganti undang-undang yang lebih demokratis di mana hak-hak buruh diakui secara legal dan politik. Salah satu cara untuk menghasilkan iklim yang demokratis bagi sektor perburuhan agar dapat tampil maksimal dalam memperjuangkan nasibnya adalah dengan adanya kebebasan membentuk serikat buruh.

Bagi FNPBI, kebebasan berorganisasi merupakan keniscayaan. Tanpa adanya kebebasan, mustahil aspirasi buruh bisa meningkatkan posisi tawarnya guna mempengaruhi kebijakan pengupahan. Adanya undang-undang perburuhan yang baru, secara normatif cukup baik namun harus disertai perubahan mendasar menyangkut perilaku pemerintah secara nyata di sektor perburuhan. Artinya, undang-undang yang baru harus dianggap pembaruan di segala bidang menyangkut perburuhan, misalnya pemerintah dan pengusaha tidak lagi

membatasi atau curiga setiap kali buruh unjuk rasa jika dirasa terjadi praktek ketidakadilan dalam hubungan industrial.

Di samping itu, posisi pemerintah harus jelas dalam menghadapi kondisi buruh yang memang buruk. Pemerintah tidak boleh lagi membela pemilik modal secara membabi buta setiap kali terjadi perselisihan antara buruh vs pengusaha.

Mean-stream politik yang dikembangkan FNPBI memang terkesan lebih clear-cut dalam menghadapi pemerintah yang dinilai tidak banyak membantu menciptakan perangkat hukum dalam politik yang mampu melindungi eksistensi hak-hak buruh. Bagi FNPBI, adanya undang-undang perburuhan yang baru memang baik, tapi persoalan riil menyangkut nasib buruh tidak sekedar apakah ada aturan yang baru atau tidak, tetapi terletak pada berubah tidaknya sikap pemerintah dalam menghadapi isu-isu keterpurukan nasib buruh di tengah sistem kapitalisme saat ini.

#### B. SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)

SPSI merupakan serikat buruh yang memiliki hubungan ideologis dan politis dengan pasang surutnya perjalanan OB. Bentuknya yang konfederasi (gabungan dari berbagai organisasi buruh) dengan jangkauan yang sangat luas dan ditopang jaringan birokrasi pemerintah, memungkinkan SPSI tampil sebagai organisasi buruh yang sangat mapan. Beban politis SPSI sebagai organisasi buruh yang pernah dekat dengan kekuasaan OB membuat langkah-langkah SPSI dalam membela buruh acapkali mendatangkan kecurigaan dari kalangan aktivis buruh.

Asas SPSI sesuai AD/ART berdasarkan Pancasila membuatnya berbeda dengan FNPBI yang bercorak sosial demokrasi. Mean-stream politik ini mau tak mau membuat SPSI terstruktur ke dalam bangunan keamanan dengan pendekatan-pendekatan yang mengutamakan kooperasi dari pada melakukan perlawanan frontal dan radikal. Hal ini nampak dari ide-ide atau isu-isu SPSI seputar masalah buruh.

Pandangan SPSI tentang buruh adalah buruh sebagai bagian dari masyarakat pekerja pada umumnya perlu mendapat perhatian pemerintah dengan mengupayakan sistem pengupahan yang lebih baik dan mensejahterakan. Di sinilah terjadi titik temu antara pandangan SPSI dengan pemerintah tentang bagaimana memperlakukan buruh bukan sebagai objek produksi tetapi sama-sama sebagai pelaku produksi yang semitra.

Walau pun disadari bahwa sistem pengupahan saat ini masih jauh dari harapan, setidaknya ada niat dari pihak pemerintah dan pengusaha untuk bekerja sama memperbaiki upah kerja yang layak agar KHM (kebutuhan hidup minimum) terpenuhi secara layak. Salah satu isu yang mendapat perhatian SPSI adalah perlunya pembedaan upah kerja antara buruh lajang dengan buruh yang berkeluarga. Menurut tim SPSI, upah kerja yang diterima buruh saat ini cenderung menyamakan antara yang lajang dengan yang berkeluarga, padahal kondisi dan kebutuhan riil mereka berbeda. Isu pembedaan upah kerja ini menjadi isu yang saat ini diperjuangkan SPSI.

Sebagai organisasi buruh yang kental dengan beban sejarah OB dan menjadi salah satu kepanjangan tangan instrumen korporatisme negara, SPSI di era reformasi berusaha untuk inklusif dalam memperjuangkan isu-isu buruh.

Usaha tersebut dilakukan dengan membentuk dan menarik anggota di setiap unit produksi, pemberdayaan anggota dan responsif terhadap isu-isu buruh yang aktual. Dengan keunggulan jaringan luas kelembagaan yang dimilikinya, SPSI potensial menjadi kekuatan penekan yang efektif, misalnya melakukan negosiasi (perundingan-perundingan) dengan pengusaha dalam memperjuangkan kepentingan buruh. Aksi demonstrasi dianggap merupakan jalan terakhir kalau perundingan gagal mencapai kesepakatan.

Dengan mengedepankan perundingan, SPSI nampak mengambil jalan tengah atau tidak konfrontatif dalam setiap kasus perselisihan buruh dengan majikan. Resikonya SPSI di daerah-daerah sering dituduh pro status quo dan pengusaha. Kecenderungan sikap buruh yang ingin memperjuangkan nasibnya lewat jalur aksi-aksi demonstrasi agar aspirasinya didengar pengusaha dari pada lewat aksi dialog yang acapkali tidak efektif menekan pengusaha, membuat SPSI kurang diminati aktivis-aktivis buruh yang radikal.

Dengan posisi yang sedikit kurang populer ini, SPSI konsisten menempuh jalur normatif dan non-konfrontatif tapi inklusif dalam memperjuangkan nasib buruh. Untuk itu, SPSI mengembangkan isu perburuhan yang strategis bahwa semua buruh tanpa memandang afiliasi dan organisasinya, berhak mendapat sistem pengupahan yang paling baik, yaitu didasarkan pada KHL (kebutuhan hidup layak) yang disesuaikan kondisi harga-harga kebutuhan dasar dan pasar (inflasi) yang dinamis. Artinya, upah buruh ideal harus selalu mendapat koreksi yang lebih baik (naik) secara periodik setelah kenaikan BBM per Pebruari 2002.

Masalahnya, apakah dengan kondisi ekonomi yang mengalami kelesuan dampak krisis ekonomi dan beban kurs rupiah yang melemah terhadap mata uang

asing (terutama dolar), pengusaha masih dapat kompetitif bersaing dan meningkatkan produktivitas usahanya ? Dalih bahwa pengusaha masih belum pulih dari keterpurukan ekonomi cenderung menjadi "pembenar" para pengusaha untuk tidak terlalu responsif atas isu-isu kenaikan upah buruh. Menurut tim SPSI, kendala utama sulitnya memperjuangkan kenaikan upah buruh adalah pengusaha cenderung menggunakan alasan krisis ekonomi sebagai senjata menolak kenaikan upah buruh. Pada sisi lain, Depriaker (pemerintah) tidak bisa berbuat banyak menghadapi sikap pengusaha tersebut dan lebih memilih menyerahkannya pada kebijakan pengusaha.

### C. Afiliasi dan Warna Politik SERIKAT BURUH REGIONAL (SBR)

SBR merupakan serikat buruh yang didirikan pada Mei 1998, yang menandai awal gerakan reformasi politik. Embrio SBR diawali dari gerakan "klandestin" (bawah tanah) dari beberapa aktivis buruh jauh sebelum 1998. Sifat perjuangan yang di bawah permukaan ini harus ditempuh mengingat rezim OB bersikap otoriter / represif atas setiap organisasi buruh yang tidak berafiliasi pada organisasi buruh satu-satunya (SPSI) menurut versi pemerintah.

Memanfaatkan gerakan reformasi politik, SBR berupaya memperjuangkan nasib buruh yang dipaksa bekerja dalam sistem eksploitasi kapitalistik yang tidak adil. Tipe perjuangan yang semula tertutup kemudian berubah menjadi terbuka, dianggap sebagai strategi jitu untuk mensosialisasikan ide-ide perbaikan nasib buruh. Hal ini kelihatan dari 3 langkah / strategi SBR dalam menciptakan kesadaran kelas di kalangan buruh.

Pertama, SBR membentuk divisi advokasi, yaitu pemberian bantuan legal terhadap isu-isu perburuhan. Kedua, divisi pendidikan dan pengorganisasian. Ketiga, divisi keorganisasian, berupa konsolidasi organisasi atau jaringan guna memperkuat misi SBR. Sedangkan asas SBR adalah demokrasi, yang dikembangkan menjadi 4 isu perjuangan, yakni solidaritas, keadilan sosial, keadilan gender dan anti diskriminasi.

Melalui isu-isu tersebut, SBR fleksibel menyoroti berbagai persoalan ketidakadilan yang dialami buruh, terutama kondisi upah kerja yang sangat tidak layak dibanding perkembangan kebutuhan sehari-hari yang meloncat tajam. Karena itu UMR yang berlaku tahun 2000/2001 sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang di derita buruh. SBR mengajukan tuntutan lewat bersama SB-SB lain agar upah buruh sebesar Rp. 579.419,- direalisasi.

Upah buruh sebesar Rp. 322.000,- (UMR 2000/2001) dianggap tidak manusiawi mengingat kebutuhan minimum hidup layak jauh di atas upah tersebut. Buruh dalam posisi yang sangat terpuruk masih juga tergencet sistem kapitalisme yang menempatkan buruh sebagai mesin produksi, terbukti –menurut penelitian SBR—komposisi pengupahan hanya menduduki porsi sebesar 5,3 persen dari total biaya produksi, sementara berani membayar biaya siluman (pungutan tak resmi) sebesar 30 persen. Sebagai pembandingan, upah kerja di Malaysia menempati porsi 23 persen dan di Thailand sebesar 13 persen dari biaya produksi.

Adanya gambaran di atas menunjukkan, upah buruh di Indonesia sangat tidak layak, sementara pengusaha sendiri berani mengeluarkan jumlah uang yang cukup besar hanya untuk mencari perlindungan politik dari penguasa. Beban ekonomi dan biaya politis yang dibayar pengusaha kepada “sektor-sektor politis”



ini sebetulnya dapat dialihkan untuk mensejahterakan buruh asal kronisme dan korupsi diberantas.

Menurut misi SBR, perjuangan yang dilakukan tidak saja bagaimana meningkatkan upah buruh semata-mata tanpa mengamputasi sistem kekuasaan ekonomi dan politik yang memberi peluang menjamurnya praktek-praktek kronisme dan renteisme. Karena itu, dalam memperjuangkan upah buruh yang lebih baik, SBR mengambil posisi bahwa memperjuangkan upah buruh yang layak harus merupakan proses yang integral dengan memperjuangkan hadirnya sistem politik yang demokratis dan adil.

Sebagai proses integral, isu upah buruh terkait dengan proses politik yang terjadi di lembaga-lembaga baik eksekutif mau pun yudikatif. Sedangkan organisasi-organisasi buruh sebagai perwakilan buruh berhak ikut dan bernegosiasi dengan pemerintah untuk menentukan upah kerja. Artinya SB berhak terlibat dalam pembuatan kebijakan, mengontrol/ mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah menyangkut upah kerja.

Contoh yang dialami SBR adalah tatkala Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Al Hilal Hamdi mengeluarkan Kepmentran No. 78/Men/2001 yang diprotes oleh SBR dan SB-SB di banyak kota. Keputusan tersebut mengatur hubungan industrial yang dianggap merugikan buruh yang bisa kena sangsi atau PHK kalau melanggar ketentuan normatif (demo tanpa pemberitahuan dan mogok). SB-SB menuntut agar pemerintah membatalkan Kepmentrans tersebut dan memberlakukan kembali Kepmentrans No. 150/Men/2000 yang dianggap lebih menguntungkan posisi tawar buruh.

ini sebetulnya dapat dialihkan untuk mensejahterakan buruh asal kronisme dan korupsi diberantas.

Menurut misi SBR, perjuangan yang dilakukan tidak saja bagaimana meningkatkan upah buruh semata-mata tanpa mengamputasi sistem kekuasaan ekonomi dan politik yang memberi peluang menjamurnya praktek-praktek kronisme dan renteisme. Karena itu, dalam memperjuangkan upah buruh yang lebih baik, SBR mengambil posisi bahwa memperjuangkan upah buruh yang layak harus merupakan proses yang integral dengan memperjuangkan hadirnya sistem politik yang demokratis dan adil.

Sebagai proses integral, isu upah buruh terkait dengan proses politik yang terjadi di lembaga-lembaga baik eksekutif mau pun yudikatif. Sedangkan organisasi-organisasi buruh sebagai perwakilan buruh berhak ikut dan bernegosiasi dengan pemerintah untuk menentukan upah kerja. Artinya SB berhak terlibat dalam pembuatan kebijakan, mengontrol/ mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah menyangkut upah kerja.

Contoh yang dialami SBR adalah tatkala Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Al Hilal Hamdi mengeluarkan Kepmentran No. 78/Men/2001 yang diprotes oleh SBR dan SB-SB di banyak kota. Dalam keputusan ini dinyatakan bahwa buruh yang keluar dari kerjanya tidak mendapat intensif atau pesangon kecuali kalau terkena PHK. Keputusan tersebut mendapat reaksi keras SB-SB karena dianggap merugikan buruh. SB-SB menuntut agar pemerintah membatalkan Kepmentrans tersebut dan memberlakukan kembali Kepmentrans No. 150/Men/2000 yang dianggap lebih menguntungkan posisi tawar buruh.

Ternyata aksi demo besar-besaran tidak menyurutkan pemberlakuan keputusan tersebut. Bahkan Menakertrans mengeluarkan keputusan yang memperkuat pemberlakuan keputusan sebelumnya lewat Kepmentrans No. 111/Men/2001. Dua Kepmentrans ini mendapat protes massal kalangan buruh di kota-kota besar Indonesia.

Dalam kasus di atas, SBR berpendapat perjuangan buruh adalah bagaimana melakukan tekanan-tekanan politik kepada pemerintah agar setiap keputusan menyangkut dunia perburuhan lahir secara holistik demi untuk mensejahterakan buruh. Sebab buruh yang sejahtera akan menaikkan daya beli mereka, dan daya beli yang naik tentu akan berdampak pada perbaikan dunia usaha.

Dari perspektif mean-stream politik SBR, perjuangan untuk memperbaiki kondisi kerja buruh tidak terlepas dari ranah politis, sebab keputusan menyangkut perburuhan yang dibuat pemerintah tidak lahir dalam kevakuman kepentingan ekonomi politik pengusaha. Hal ini tercermin dari ide SBR tentang demokrasi sosial yang menekankan arti penting hadirnya lingkungan politik yang berkeadilan sosial, anti diskriminasi, solidaritas dan persamaan gender. Dengan demikian, suatu kebijakan upah buruh adalah suatu kebijakan politik ekonomi yang dibuat pemerintah, lobi bisnis pengusaha dan wakil kepentingan buruh. Di sinilah lobi kekuatan buruh secara politik dikerahkan untuk membela hadirnya kepentingan demokrasi sosial kebijakan perburuhan.

#### D. Afiliasi dan Warna Politik SARBUMUSI

Sarbumusi berdiri pada 27 September 1955 di Tulungan, Sidoarjo. Sarbumusi merupakan organisasi buruh yang pada awalnya berafiliasi pada partai Nahdlatul Ulama (NU). Kelahirannya pada waktu itu sebagai respon untuk menghimpun kekuatan (massa) buruh petani khususnya buruh sektor perkebunan gula di Jawa Timur. Asas Sarbumusi berdasarkan pada Islam yang diharapkan akan mampu menarik simpati/dukungan dari kalangan petani yang ketika itu (1955) tengah ditarik ke dalam orbit SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang berafiliasi pada PKI.

Sebagaimana organisasi buruh lainnya, periode 1950-an dan 1960-an merupakan periode 'perjuangan ideologi' dimana pertarungan untuk memperjuangkan aspirasi buruh dianggap merupakan salah satu strategi efektif guna mempertahankan eksistensi formal gerakan buruh di hadapan massa politik yang telah terkotak-kotak akibat adanya puluhan organisasi buruh yang umumnya merupakan under-bouw partai politik. Sarbumusi yang bergerak pada lintasan isu agama dan kekuasaan tak terhindarkan 'terkooptasi' pada praksis mobilisasi kekuatan religio-massa guna menopang basis konstituensi partai NU.

Lahirnya OB dan langkahnya untuk membersihkan setiap organisasi buruh yang ada dari hubungannya dengan kekuatan partai politik, membuat Sarbumusi mengalami stagnasi keorganisasian. Sebagaimana organisasi buruh lainnya di era OB, Sarbumusi harus menerima kenyataan pahit untuk meleburkan diri ke dalam wadah organisasi korporatis buruh di bawah FPSI (SPSI). Peleburan ini secara politik, organisasi dan kepemimpinan, membuat Sarbumusi hanya eksis dalam SPSI

sebatas peran wakilnya saja tanpa mengkaitkan diri lagi dengan Sarbumusi sebagai organisasi buruh dengan roh ke-NU-annya.

Selama awal OB, wacana politik dan ideologi Sarbumusi stagnan, terlebih ketika NU dilebur ke dalam PPP tahun 1973 dimana mulai terasa kemunduran organisasinya. Perubahan drastis terjadi pada tahun 1984, ketika NU memutuskan keluar dari PPP. Sejak itu, NU kembali pada jati dirinya sebagai organisasi keagamaan. Posisi Sarbumusi pun ikut terkoreksi. Sarbumusi tidak lagi memainkan peran sebagai organisasi buruh yang berafiliasi pada kekuasaan politik tapi beralih pada organisasi buruh yang bernaung di bawah payung NU serta berjuang demi kesejahteraan hidup buruh. Walau pun telah melepaskan baju politiknya, penetrasi dan hegemoni negara atas setiap organisasi buruh membuat BS-BS tidak berani tampil terang-terangan membela buruh yang makin sengsara.

Berkat reformasi politik 1998, pada tanggal 26 Juni 1998, Sarbumusi dideklarasikan kembali tapi dengan warna yang lebih kompromis dengan iklim politik saat ini. Asas/ideologinya tidak lagi Islam, tapi Pancasila (AD Bab II Pasal 4). Mengapa asasnya Pancasila tidak Islam ?

Menurut salah seorang pendirinya yang berhasil diwawancarai, penggunaan asas Pancasila merupakan konsekuensi dari langkah NU yang pada tahun 1984 telah menyatakan kembali pada khitahnya sebagai ormas keagamaan yang berdasarkan Pancasila. Semangat politik baru ini membuat Sarbumusi lebih leluasa memperjuangkan nasib buruh tanpa membeda-bedakan latarbelakang sosial-politiknya. Buruh bagi sarbumusi adalah segenap warga negara Indonesia yang bekeerja di segala sektor usaha ( industri, pertanian, perikanan, perkebunan dan sebagainya) yang berhak mendapat perlindungan, pembelaan termasuk hak-

hak untuk berserikat, memperoleh pekerjaan dan berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan.

Sifat perjuangan yang "universal" ini menempatkan Sarbumusi mampu bergerak secara praktis untuk menembus segala permasalahan perburuhan, mulai dari upah kerja, kondisi kerja, tunjangan keluarga sampai pada masalah kebutuhan spiritual buruh. Peran serta Sarbumusi dalam memperjuangkan perebaikan upah kerja juga makin leluasa jika bergerak tanpa dibebani warna dan kepentingan kekuasaan politik tertentu. Dalam upaya membangun koalisi bersama dengan SB-SB lain pun, Sarbumusi hadir tanpa kecurigaan ideologis. Jadi keuntungan untuk bersikap non partai atau tidak mengkaitkan diri dengan kepentingan salah satu partai justru mengurangi potensi konflik Sarbumusi dengan pihak-pihak luar.

Walau pun Sarbumusi menyatakan diri non partai, tak berarti beban historisnya sebagai organisasi buruh yang pernah menggunakan mobilisasi agama dapat dihilangkan. Afiliasi sosialnya pada NU sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan sebagai instrumen mobilisasi politik guna mendukung salah satu partai politik tertentu, dalam hal ini PKB. Label "Muslimin" dalam Sarbumusi berkonotasi untuk mengarah pada politisasi massa buruh (Islam) sehingga perbedaan antara ranah non politik (memperjuangkan kepentingan objektif buruh) dengan ranah politik (kekuasaan politik kelompok) sulit sekali dipisahkan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari bahasan penelitian ini emngacu pada tiga tujuan penelitian yakni :

A. Mendiskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya serikat-serikat buruh (SB):

Dari 4 SB yang diteliti (FNPBI, SPSI, SBR dan Sarbumusi), kecenderungan yang muncul adalah SB-SB ini berdiri karena munculnya gerakan reformasi politik menuju pluralisme politik. Respon atas pluralisme politik ini diwujudkan lewat asosiasi buruh yang hampir 30 tahun gerakan SB dikooptasi secara politik dan ideologi oleh negara.

B. Arah afiliasi politik dan warna ideologi SB-SB :

Satu serikat buruh yaitu FNPBI yang berasaskan sosial demokrasi mendukung adanya demokrasi sosial di segala bidang kehidupan dan menentang eksistensi kapitalisme yang dianggap mensengsarakan buruh. Kapitalisme dianggap memiliki karakter ekonomis yang eksploitatif dan anti buruh serta mewakili imperialisme ekonomi.

FNPBI dirintis dan dikelola oleh aktivis-aktivis kampus yang lekat dengan PRD (Partai Rakyat Demokrasi) sehingga ide-ide sosial politiknya merupakan warna / ide-ide PRD. Walau pun tak secara eksplisit berafiliasi pada PRD tapi karena ide perjuangan FNPBI didukung aktivis PRD, terbuka kemungkinan afiliasi FNPBI tertuju pada PRD.





## Saran-Saran

1. Penelitian tentang dunia pekerja/buruh sangat relevan dilakukan mengingat latar belakang Surabaya sebagai kota industri di mana jumlah pekerja/buruh sangat besar. Potensi konflik perburuhan pun tak terelakan akan muncul sebagai konsekuensi makin menjamurnya organisasi pekerja dengan beragam tuntutan mereka.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih luas menyangkut dunia perburuhan, terutama untuk menghimpun data dan peta dunia konflik pekerja/buruh di Surabaya di masa mendatang.

3 SB lainnya (SPSI, SBR dan Sarbumusi) lebih fleksibel dalam warna perjuangan mereka. SPSI dan Sarbumusi yang berasaskan Pancasila jelas bersikap non-konfrontasi dalam memperjuangkan isu-isu buruh karena mereka lebih mengedepankan cara-cara musyawarah dari pada aksi-aksi demo dan mogok untuk menekan pengusaha. Dengan cara non-konfrontasi, pendekatan mereka untuk memperjuangkan nasib buruh akan disukai pemerintah dari pada jika menggunakan aksi demo/mogok.

Sedangkan SBR bercorak sosial demokrasi, lebih dekat pada ide-ide kerakyatan tapi tidak terlalu radikal dalam menentang kapitalisme seperti halnya FNPBI. Mean-stream SBR adalah anti diskriminasi (ekonomi, politik dan gender) sehingga menempatkannya sebagai SB yang mampu memanfaatkan isu-isu kesetaraan gender antara buruh laki dan perempuan yang secara empiris acapkali diperlakukan secara berbeda.

#### C. Kooperasi antar SB :

Lingkup kerja sama antar SB cenderung terbatas pada aktivitas koordinasi bersama ketika hendak melancarkan aksi demo yang melibatkan SB-SB. Contohnya pada saat SB-SB menggelar aksi demo memperjuangkan kenaikan upah kerja tahun 2000 lalu. Juga aksi di kawasan industri Tanjungsari, demo di depan kantor Gubernur 2001 menentang Kepmentrans No. 78 Th. 2001 yang berakhir dengan kekerasan antara buruh dengan polisi. Dalam skala yang lebih strategis, SB-SB juga mengirim wakil-wakilnya untuk duduk dalam komisi pengupahan bersama dengan wakil Apindo (asosiasi pengusaha) dan Depnakersaat membahas kenaikan UMR 2001/2002.

## DAFTAR PUSTAKA

- Clark, John, *Democratizing Development The Role of Voluntary Organisation*, Connecticut, Kumarian Press, 1990
- Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok Penekan*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Evers, Hans- Deiter, *Kelompok-Kelompok Strategis*, Jakarta, Yayasan Obor, 1990
- Gurr, Ted Robert, *Why Man Rebel*, New Jersey, Princetown University Press, 1974
- Hadiz, Vedi, *Contradiction of Corporatism : Workers and The State In New Order Indonesia*  
(Phd Thesis), Murdoch University, 1996
- Loh Cheng Koi, *Banyak Jalan Satu Tujuan*, Surabaya, Humanika, 1993
- Uwiyono, A; *Serikat Pekerja dan Peningkatan Hak-Hak Asasi Serta Standar Ketenaga Kerjaan di Indonesia*, <http://psi.ut.ac/jurnal/101uwiyono.htm>
- Undang-Undang Nio. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
- Wibawanda, Agung dkk, *Siasat Buruh Dibawah Represi*, Jogjakarta, Lapera, 1998

PAMERAN

31 MAY 2003